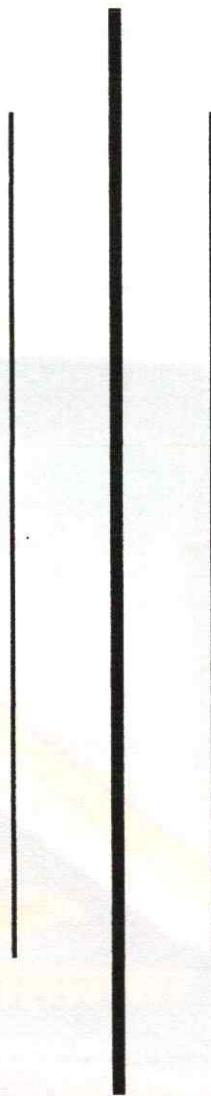




RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BATAM
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2022



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan. . .

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

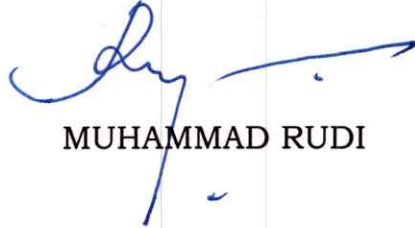
Agar. . .

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 956

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022,5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bapelitbangda 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... ..32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA.....33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....34

3.3 Program dan Kegiatan34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA.....51

BAB V PENUTUP.....69

5.1 Catatan Penting69

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....69

5.3 Rencana Tindak Lanjut69

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

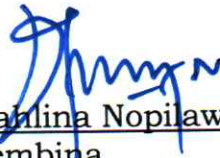
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023, merupakan penjabaran Renstra Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapelitbangda Kota Batam dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi.

Batam, 22 Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan Pembangunan
Daerah Kota Batam



Dahlina Nopilawati, ST
Pembina
NIP. 19751121 200212 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) ;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
10. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2022, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap rancangan Awal RKPD;
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta

Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, antara lain :

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2021 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2021. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2022, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 13,248,931,210,- Belanja Operasi sebesar Rp.13,061,845,210,- dan Belanja Modal sebesar Rp.187,086,000,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam.

Tabel 1/ T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2022 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 / (n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022) / n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	0									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	46.78%	46.78%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dok						3 dok	1 dok	33.33%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%						100%	45.11%	45.11%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%						100%	58.30%	58.30%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%						100%	0.00%	0.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%						100%	49.25%	49.25%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%						100%	33.95%	33.95%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarsaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.00%						90.00%		0.00%

	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%						100%	0%	0.00%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang data dan informasi perencanaan pembangunannya lengkap	100%						100%	100%	100.00%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkunga Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%						100%	100%	100.00%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%						100%	100%	100.00%

		2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%						100%	100.00%
		3. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%						100%	100.00%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 OPD					15 OPD	15 OPD	100.00%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 OPD					10 OPD	10 OPD	100.00%

	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 OPD	18 OPD	18 OPD	100.00%
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	50%	0%	0.00%
	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang pengelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	0	0.00%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	0	0.00%

Data pada row 5, 6, 7 dan 8 tidak diisi karena tahun 2020 dan 2021 bukan termasuk periode perencanaan. Data realisasi pada row 10 adalah data realisasi sampai dengan triwulan 2 atau semester 1 tahun anggaran 2022. Secara umum capaian program dan kegiatan Bapelitbangda berjalan baik, sesuai dengan target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Bapelitbangda Kota Batam sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi, Bapelitbangda Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapelitbangda dengan program tingkat Kota Batam menjadi mutlak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

1. fungsi perencanaan; dan
2. fungsi penelitian dan pengembangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Bapelitbangda Kota Batam didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar PD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara

vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar PD;

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. OPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi perencanaan pembangunan;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	OPD
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Pengukuran kinerja pelayanan Bapelitbangda dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel.3/ Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n-2	Tahun n-1	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90%	95%	95%		0%			95%	95%	
2	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%	100%		100%			100%	100%	
3	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%	100%		100%			100%	100%	
4	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%	100%		100%			100%	100%	

5	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief				50%		50%		50%	0%		50%	
6	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100%		100%		100%	46.78%		100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bapelitbangda Kota Batam memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan melalui strategi operasional yang diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasional Bapelitbangda Kota Batam mengacu pada Renstra Bapelitbangda Kota Batam yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Batam. Adapun strategi Bapelitbangda Kota Batam untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bapelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Membangun dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan melalui sistem/aplikasi SIPD dan sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SEPP);
3. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bapelitbangda;
6. Memanfaatkan *database* pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
9. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2016-2021, khususnya pada Tahun Anggaran 2019, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi e-planning pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat tercipta konsistensi dan sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;
2. Tersedianya aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP);
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasi secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan dan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.

Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perkembangan Bapelitbangda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Bapelitbangda melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Namun terdapat perubahan Sub kegiatan dan penambahan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dari Rancangan Awal RKPD yang bisa terlihat dari tabel TC-31 sebagai berikut:

Tabel 4/ Tabel T-C 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA BATAM	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,718,498,458	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA BATAM	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	15,737,139,802	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	105,635,782	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	474,859,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	62,019,189	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	261,386,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43,616,593	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	213,473,000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,580,742,436	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,759,695,850	
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA BATAM	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4,706,520	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA BATAM	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	12,692,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA BATAM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	581,084,290	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA BATAM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	1,980,311,850	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA BATAM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	165,467,031	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA BATAM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	83,356,000	
Penyediaan Barang dan Penggandaan	KOTA BATAM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	123,114,805	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA BATAM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	66,720,000	
Penyediaan Bahan Peraturan Perundang-undangan	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	11,171,520	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	-	

Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	695,198,270	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	616,616,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	3 unit	106,749,967	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	3 unit	225,625,000	
Pengadaan Mebel	KOTA BATAM	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	106,749,967	Pengadaan Mebel	KOTA BATAM	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	225,625,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	547,061,472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	560,513,200	
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA BATAM	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	78,940,442	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA BATAM	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	76,110,000	
Penyediaan Jasa Kantor Umum	KOTA BATAM	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	468,121,030	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA BATAM	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	484,403,200	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	persentase pemeliharaan BMD	100%	248,704,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	persentase pemeliharaan BMD	100%	277,565,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA BATAM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinan	7 Unit	207,449,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA BATAM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit	245,180,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA BATAM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 Unit	41,255,500.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA BATAM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 Unit	32,385,000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RKPD	95%	1,123,873,402	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RKPD	95%	1,280,587,000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	KOTA BATAM	persentase keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	873,930,570	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	KOTA BATAM	persentase keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	834,931,500	

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	1 Dok	-	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	1 Dok	-	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	1 Dok		
Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah SKPD/Lintas SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 BA	99,553,904	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah SKPD/Lintas SKPD	KOTA BATAM	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 BA	95,270,500						
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	609,732,252	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	577,603,000						
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	KOTA BATAM	jumlah dokumen RKPD dalam 1 tahun	2 Dok	164,644,414	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	KOTA BATAM	jumlah dokumen RKPD dalam 1 tahun	2 Dok	162,058,000						
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah data yang mendukung perencanaan	100%	166,011,890	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah data yang mendukung perencanaan	100%	103,227,000						

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	190 orang	166,011,890	Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	190 orang	103,227,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	persentase renstra perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	5 Laporan	83,930,942	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	persentase renstra perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	5 Laporan	342,428,500	
Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	50,111,508	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	308,732,500	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	33,819,434	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	33,696,000	

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	persentase hasil RKPD yang diakomodir di APBD	100%	902,226,647	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	persentase hasil RKPD yang diakomodir di APBD	100%	689,975,500	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang PMM dan Pembangunan Manusia	100%	347,444,931	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang PMM dan Pembangunan Manusia	100%	135,338,500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	43,098,659	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	31,405,750	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	78,694,395	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	26,994,750	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Manusia	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	225,651,877	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	76,938,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KOTA BATAM	Jumlah OPD yang berkoordinasi	100%	222,102,720	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KOTA BATAM	Jumlah OPD yang berkoordinasi	100%	221,978,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	62,894,580	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	62,856,000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	10 OPD	74,629,848	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	10 OPD	84,528,500	

Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	10 Laporan	84,578,293	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	10 Laporan	74,593,500.00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	100%	332,678,996	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	100%	332,659,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	94,718,555	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	94,716,500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18 Perangkat Daerah	112,110,584	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18 Perangkat Daerah	112,107,000	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	18 Laporan	125,849,857	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	18 Laporan	125,835,500	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KOTA BATAM			662,335,594	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KOTA BATAM				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	662,335,594	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	737,125,500	
Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	KOTA BATAM	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang terealisasi	1 Dokumen	404,212,594	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	KOTA BATAM	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang terealisasi	1 Dokumen	26,960,000	
Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan aparatur dan reformasi birokrasi	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	4,212,594	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	KOTA BATAM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	26,960,000	

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	KOTA BATAM	Jumlah dokumen kajian teknokratik	1 Dokumen	400,000,000						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	KOTA BATAM	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian	58,123,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	KOTA BATAM	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian	343,679,500	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	58,123,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	91,811,000	
					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	KOTA BATAM	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		251,868,500	
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	KOTA BATAM	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/dikembangkan	1 Inovasi dan Teknologi	200,000,000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/dikembangkan	1 Inovasi dan Teknologi	366,486,000	

Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	200,000,000	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	KOTA BATAM	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	366,486,000	
TOTAL				16,406,934,100					18,444,827,802	

2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberi usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu usulan Perencanaan Pembangunan juga berasal dari Kunjungan Kerja Walikota batam dan melalui Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Batam yang telah diterima akan dilakukan penginputan melalui sistem *E-Planning* oleh pihak Kelurahan/Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk program/Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, tidak terdapat usulan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 5/Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Bapelitbangda Kota Batam

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan;

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan , yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Meningkatkan stabilitas politik,hukum,pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Sesuai tugas pokok Bapelitbangda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya, maka merupakan tugas wajib Bapelitbangda untuk menyelaraskan prioritas pembangunan

daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”

Berdasarkan visi tersebut, maka Bapelitbangda Kota Batam mendukung Misi 5, yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bapelitbangda Kota Batam mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”

Adapun sasaran Renja Bapelitbangda Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda sesuai tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi: fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut telah ditetapkan program/kegiatan.

Pada tahun 2023, Bapelitbangda merencanakan 4 (empat) program dan 16 kegiatan serta 33 sub kegiatan. Sebanyak 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

disusun untuk mendukung pencapaian sasaran 1, yaitu meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan.

Selanjutnya 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran 2, yaitu: Optimalnya Kualitas Layanan pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dearah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 18.444.827.802,- yang bersumber dari DAU untuk kebutuhan gaji ASN, dan bersumber dari PAD untuk kegiatan lainnya.

Jika dibandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan RKPD 2023, terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Terdapat penambahan satu sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Urgensi penambahan sub kegiatan tersebut adalah sesuai dengan Surat Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 19 April 2022, perihal Persiapan Pelaksanaan Program PPSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kota sebagai syarat pengajuan DAK dan APBN. Perbandingan Renja Bapelitbangda pada dokumen Ranwal RKPD dan RKPD 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbedaan Renja Bapelitbangda pada Ranwal RKPD dan RKPD 2023

RANCANGAN AWAL RKPD			RKPD 2023		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	2 Penelitian /Kajian	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	2 Penelitian n/Kajian
Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang terealisasi	1 Dokumen	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang terealisasi	1 Dokumen
Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen kajian teknokratik	1 Dokumen			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/ dikembangkan	1 Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/ dikembangkan	1 Inovasi dan Teknologi
Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan

Adapun prioritas program Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

- A. URUSAN PERENCANAAN
- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- I.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- I.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- I.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- I.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- I.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- I.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- I.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- I.5.1 Pengadaan Mebel
- I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- I.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- I.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- I.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- I.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
- II.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
- II.1.1 Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah SKPD/Lintas SKPD
- II.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- II.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota
- II.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- II.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- II.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- II.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- II.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- III.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
- III.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- III.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- III.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- III.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- III.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- III.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- III.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- III.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
- III.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- III.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- III.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- I.1 Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**
- I.1.1 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi
- I.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
- I.2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum
- I.2.2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- I.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
- I.3.1 Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				17,890,190,802				16,397,867,630
5.01	PERENCANAAN				17,153,065,302				16,153,554,637
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	15,737,139,802	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) dan DAU		100%	13,989,126,532
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kota Batam	3 Dok	474,859,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		3 Dok	105,635,782
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Batam	2 dok	261,386,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		2 dok	62,019,189

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi kinerja SKPD	Kota Batam	1 Laporan	213,473,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Laporan	43,616,593
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	11,276,440,752	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	11,743,467,846
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	43 orang/bulan	11,233,000,752	DAU	43 orang/bulan	11,487,249,621
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	396 Dokumen	43,440,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	396 Dokumen	256,218,225
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	162,441,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	119,515,000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kota Batam	4 Paket	162,441,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	4 Paket	119,515,000

5.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	2,759,695,850	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	1,406,237,582
5.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	12,692,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Paket	4,706,520
5.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	11 Paket	1,980,311,850	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	11 Paket	581,084,290
5.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	4 Paket	83,356,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	4 Paket	83,800,364
5.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	66,720,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Paket	123,114,805
5.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	30 Laporan	616,616,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	30 Laporan	613,531,603
5.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	225,625,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	25,083,300

5.01.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kota Batam	3 paket	225,625,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 paket	25,083,300
5.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	560,513,200	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	547,061,472
5.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	76,110,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	12 Laporan	78,940,442
5.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	484,403,200	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	12 Laporan	468,121,030
5.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	277,565,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	42,125,550

5.01.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Batam	7 Unit	245,180,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		7 Unit	-
5.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	49 Unit	32,385,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		49 Unit	42,125,550
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselaran Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	95%	1,280,587,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		95%	1,215,778,773
5.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	834,931,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		100%	905,042,498
5.01.02 .2.01.0 4	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Batam	43 BA	95,270,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		43 BA	103,098,023
5.01.02 .2.01.0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 BA	577,603,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		1 BA	631,438,720

5.01.02 .2.01.0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Batam	2 Dok	162,058,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	2 Dok	170,505,755
5.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang data dan informasi perencanaannya pembangunannya lengkap	Kota Batam	100%	103,227,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	51,895,478
5.01.02 .2.02.0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	Kota Batam	190 orang	103,227,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	190 orang	51,895,478
5.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	342,428,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	258,840,797
5.01.02 .2.03.0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Batam	3 laporan	308,732,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	3 laporan	171,921,914

5.01.02 .2.03.0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Batam	1 laporan	33,696,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		1 laporan	86,918,883
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam	100%	135,338,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		100%	948,649,332
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam	100%	221,978,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		100%	
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam	100%	332,659,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		100%	

5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Daerah Perencanaan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	15 OPD	135,338,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	15 OPD	359,813,971
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	9 Dokumen	31,405,750	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	9 Dokumen	44,632,971
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	6 Dokumen	26,994,750	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	6 Dokumen	81,495,916
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	Kota Batam	15 Laporan	76,938,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	15 Laporan	233,685,084

5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Daerah Perekonomian dan SDA yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	10 OPD	221,978,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		10 OPD	244,312,993
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	10 Dokumen	62,856,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		10 Dokumen	70,298,004
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	Kota Batam	10 OPD	84,528,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		10 OPD	91,981,717
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Kota Batam	10 Laporan	74,593,500.00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		10 Laporan	82,033,272

5.01.03 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Daerah Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	18 OPD	332,659,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	18 OPD	344,522,368
5.01.03 .2.03.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	18 Dokumen	94,716,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	18 Dokum en	98,090,535
5.01.03 .2.03.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	Kota Batam	18 OPD	112,107,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	18 OPD	116,101,721
5.01.03 .2.03.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Kota Batam	18 Laporan	125,835,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	18 Lapora n	130,330,112

5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Kota Batam		737,125,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)			211,482,562
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Kota Batam	50%	737,125,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	50%		211,482,562
5.05.02.2.01	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi	Kota Batam	1 Dokumen	26,960,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Dokumen		4,362,562
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah LaporanPelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Batam	1 Laporan	26,960,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Laporan		4,362,562
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	Kota Batam	2 penelitian	343,679,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-		-

5.05.02 .2.03.0 9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Batam	1 Dokumen	91,811,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		-
5.05.02 .2.03.1 1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Batam	1 Dokumen	251,868,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		-
5.05.02 .2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/ dikembangkan	Kota Batam	1 Inovasi dan Teknologi	366,486,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		207,120,000
5.05.02 .2.04.0 3	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Kota Batam	2 Laporan	366,486,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		207,120,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapelitbangda Kota Batam, akan dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023. Adapun rincian program/kegiatan serta pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target
5													
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1									17,707,702,302		16,164,726,157	
5	1	1								15,737,139,802		14,000,298,052	
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								105,635,782
5	1	1	2	1	1	100 %	2 dokumen	100 %		261,386,000	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	62,019,189	

5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1 Laporan	100 %	213,473,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	43,616,593
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11,276,440,752				11,743,467,846
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	49 orang/bulan	100 %	11,233,000,752	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,487,249,621
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	396 Dokumen	100 %	43,440,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	256,218,225
5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							162,441,000				119,515,000

5	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	4 paket	100 %	162,441,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	119,515,000
5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,417,409,102
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 Paket	100 %	12,692,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,706,520
5	1	1	2	1													
5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	11 Paket	100 %	1,980,311,850	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	581,084,290
5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	4 Paket	100 %	83,356,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83,800,364
5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	1 Paket	100 %	66,720,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	123,114,805

5	1	1	2	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	30 Laporan	100 %	616,616,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	613,531,603
5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												25,083,300
5	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	3 unit	100 %	225,625,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25,083,300
5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												547,061,472
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	12 Laporan	100 %	76,110,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	78,940,442
5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	12 Laporan	100 %	484,403,200	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	468,121,030
5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												42,125,550

5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	7 Unit	100 %	245,180,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	49 unit	100 %	32,385,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42,125,550
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
5	1	2	2	2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BA Forum PD/Lintas PD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	95 %	43 Berita Acara	95 %	95,270,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	103,098,023
5	1	2	2	4													

5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	95 %	1 Berita Acara	95 %	577,603,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	631,438,720	
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan(RP JPD/RPJMD/R KPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	162,058,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	170,505,755	
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Kota Batam, Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	190 Orang	95 %	103,227,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)			51,895,478	
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %				103,227,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	51,895,478
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								342,428,500				258,840,797	

5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Laporan	95 %	308,732,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	171,921,914
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	95 %	33,696,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	86,918,883
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												948,649,332
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												359,813,971
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD<RPJ MD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD<RPJ MD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	9 Dokumen	100 %	31,405,750	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	44,632,971

5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	18 Dokumen	100 %	94,716.500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	98,090.535
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	

5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	18 Perangkat Daerah	100 %	112,107,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	116,101,721
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	

5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	18 Laporan	100 %	125,835,500	PENDAPAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	130,330,112
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100 %					Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											961,482,562
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											211,482,562
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											4,362,562

5	5	2	2	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan n bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	1 Laporan	50 %	26,960,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	4,362,562
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											0
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pekerjaan Umum	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Sebagai Policy Brief	50 %	2 dokumen	50 %	91,811,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	0
5	5	2	2	#	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Sebagai Policy Brief	50 %	1 Dokumen	50 %	251,868,500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	0
5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi											207,120,000
5	5	2	2	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	1 Laporan	50 %	366,486,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	207,120,000
TOTAL												18,444,827,802				17,126,208,719

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan serta pengembangan berbagai potensi yang ada di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam. Selanjutnya, secara langsung dapat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2023 adalah:

- a. Renja Bapelitbangda Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2023 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan

- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan